

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 16											TAHUN 2006																			

## Renaissance Capital Pembeli Anak Perusahaan Bumi

JAKARTA — PT Borneo Lumbung Energi yang merupakan afiliasi dari PT Renaissance Capital telah mendaratkan perjanjian jual dengan PT Bumi Resources Tbk. Perjanjian tersebut meliputi kesepakatan Bumi untuk menjual aset batubara di PT Arutmin Indonesia (100 persen), PT Kaltim Prima Coal (KPC) (95 persen), dan Indo-coal Resources Limited (100 persen).

Total nilai penjualan tiga anak perusahaan Bumi tersebut mencapai 3,2 miliar dolar AS. Dalam penjualan ini, Credit Suisse bertindak sebagai penasihat keuangan untuk konsorsium investor dan financial arranger untuk transaksi. "Bumi masih akan mencari peluang industri energi dan sumber

daya alam di Indonesia," kata Corporate Secretary Bumi Resources, Gerson J. Sasul, dalam siaran pers-nya, kemarin.

Ia menambahkan tingginya permintaan sumber daya di pasar domestik maupun di Asia seperti Cina dan India merupakan peluang emas bagi Bumi untuk terus berkembang.

Menurutnya saat ini perseroan sedang melakukan studi untuk pengembangan batubara cair, briket batubara, biomassa, biodiesel dan upgraded brown coal. "Selain itu Perseroan juga sedang melakukan studi keekonomian untuk proyek pembangkit listrik," tuturnya.

Sesuai dengan peraturan pasar modal, Bumi akan minta persetu-

juan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bertindak sebagai penasihat keuangan Bumi adalah PT Danareksa Makmur dan PT JP Morgan Securities Indonesia.

Sementara itu menurut analisis dari Sinar Mas Sekuritas, Alfiansyah, dengan adanya dana masuk akibat dari penjualan anak perusahaan Bumi, akan meningkatkan earning per share (EPS) bagi pemegang saham. Setelah dana masuk akan mempengaruhi dalam valuasi sehingga pendapatan lain-lain meningkat dan akan mendorong laba.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) melakukan penghentian perdagangan sementara (suspend) saham Energi Mega Persada (ENRG). Ini dilaku-

kan kemungkinan Bumi akan menggunakan dana hasil penjualan anak usahanya untuk mengakuisisi Energi. Sebelumnya BEJ mengumumkan telah mensuspendi saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI). ■ C31

### Fakta Angka

**Rp 1,5 Triliun**

laba bersih Bumi Resources pada 2005

**Rp 15,9 Triliun**

aset Bumi Resources per 2005

## MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

### KILAS EKONOMI

#### BPPT- PT Badak Kerjasama Batubara

JAKARTA (Suara Karya): PT Badak, Kalimantan Timur bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) segera merealisasikan penggunaan batubara sebagai bahan bakar pengganti gas di pabrik pupuk PT Badak Kaltim. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kasus Arun kedua. Di mana pabrik terhenti gara-gara putusnya pasokan gas,

"Realisasinya sudah langsung jalan. Sekarang tinggal negosiasi pelaksanaan dan biaya karena kita (BPPT dan PT Badak) sama-sama berkepentingan. Keduanya sama-sama membiayai," kata Kepala BPPT Kusmajanto Kadiman, sesuai penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* untuk kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan pelayanan jasa teknologi guna mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi, antara BPPT dan PT Badak di Kantor BPPT, Jakarta, Jumat (17/3).

Bahkan, jika bisa dimanfaatkan batubara yang muda, maka pengeluaran bisa lebih ditekan lagi karena harga batu bara muda lebih murah.

Presiden Direktur PT Badak Kaltim NGL Yoga P Suprpto mengatakan, substitusi gas ke batubara akan dapat menghemat biaya sampai 10 persen. PT Badak, tidak mengharapkan terjadi kasus serupa Arun atau Arun kedua. Saat ini, PT Badak memproduksi sekitar 300 kapal gas per tahun. (Indra)

### MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 **18** 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

#### Biji Nikel Ekspor Terbesar Sulsel

■ MAKASAR-Ekspor biji nikel yang diproduksi PT Inco tercatat memberikan kontribusi terbesar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulsel Amal Natsir mengungkapkan hal itu di Makassar, Sabtu (18/3). "Jadi, di Sulsel setidaknya ada 10 komoditas ekspor yang menjadi unggulan. Namun nikel sebagai penyumbang devisa terbesar di Sulsel," ujar Amal Natsir. (ani)

53

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : A.15												TAHUN 2006																		

# Bumi Ekspansi Usaha Batu Bara Cair

## Agenda selanjutnya merger dengan Energi Mega Persada.

JAKARTA — PT Bumi Resources Tbk. akan melakukan ekspansi usaha ke sektor batu bara cair pascapenjualan PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan Indocoal Resources Limited senilai US\$ 3,2 miliar (sekitar Rp 29,4 triliun).

Menurut Direktur Utama Bumi Ari S. Hudaya, ekspansi pembangunan pabrik batu bara cair yang kemungkinan berlokasi di Sumatera Selatan akan dimulai tahun depan. Sumber dana ekspansi berasal dari hasil penjualan ketiga perusahaan pertambangan batu bara tadi. "Nilai investasinya sekitar US\$ 3 miliar (sekitar Rp 27,6 triliun)," kata Ari kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

Ari mengatakan, sisa dana penjualan ketiga aset sekitar US\$ 200 juta (Rp 1,8 triliun) akan digunakan mengembangkan usaha energi alternatif yang lebih menguntungkan

secara ekonomis. Misalnya produk-produk turunan batu bara, antara lain *upgraded brown coal* dan briket batu bara.

Pada Kamis lalu, secara mengejutkan perusahaan grup Bakrie ini menjual 100 persen saham Arutmin, 95 persen saham KPC, dan 100 persen saham Indocoal kepada konsorsium PT Borneo Lumbung Energi. Nilai penjualan kepada perusahaan milik Renaissance Capital itu mencapai US\$ 3,2 miliar.

Nilai penjualan KPC dan Arutmin ini mematahkan rekor penjualan saham PT HM Sampoerna Tbk. milik Putera Sampoerna kepada Philip Morris International senilai US\$ 2 miliar (sekitar Rp 18,4 triliun) pada Maret 2005. Nilai penjualan KPC ini menguntungkan Bumi dan grup Bakrie. Sebab, mereka hanya membeli perusahaan induk KPC (Sangatta Holding Ltd. dan Kalimantan Coal) senilai US\$ 500 juta (sekitar Rp 4,5 triliun) pada 2003.

Agenda Bumi selanjutnya me-

masuk ke bisnis perminyakan dan gas bumi, dengan menggabungkan usaha (merger) dengan PT Energi Mega Persada Tbk., perusahaan perminyakan di bawah payung grup Bakrie. Namun, merger sesama grup Bakrie—Nirwan Bakrie dan Aburizal Bakrie—ini tampaknya baru bisa terealisasi tahun depan. Sebab, bursa masih melarang Energi Mega melakukan aksi korporasi hingga akhir 2006.

Ari juga mengelak kemungkinan menggunakan dana hasil penjualan ketiga aset itu untuk merger dengan Energi Mega.

Kemarin, Bursa Efek Jakarta menghentikan sementara perdagangan (suspensi) saham Bumi dan Energi Mega. Menurut Kepala Divisi Sektor Ritel BEJ, suspensi dilakukan karena mempertimbangkan dampak materialitas terhadap perdagangan kedua saham emiten itu di bursa. "Suspensi dilakukan sejak pembukaan perdagangan hingga ada pengumuman lebih lanjut," ujarnya. ● SULTYANTI PAKPAHAN | PADJAR ISHARA

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 19												TAHUN 2006																		

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Semua Kontrak Karya Akan Diperiksa Lagi

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah akan memeriksa kembali seluruh kontrak karya yang pernah ditandatangani pemerintah dengan perusahaan tambang. Pemeriksaan itu terutama terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah itu dimaksudkan agar pemerintah tidak menderita kerugian.

Kontrak karya untuk pengelolaan Blok Cepu merupakan salah satu kontrak karya yang dinilai memenuhi persyaratan cukup baik di mana Pertamina dan perusahaan asing bekerja sama dalam pengoperasian.

Demikian dikemukakan Jusuf Kalla menjawab pers sesuai shalat di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (17/3).

Pers sebelumnya menanyakan sejauh mana pemerintah akan menindaklanjuti kontrak karya antara Pemerintah dan Exxon-

Mobil di Kawasan Kepulauan Natuna, mengingat kontrak karya itu sudah habis. Lagi pula, pemerintah disebut-sebut tidak mendapatkan royalti.

"Kalau di Natuna, kami masih mempelajari. Dan, kontrak karya lainnya, kami masih akan mempelajari semuanya apakah itu masih memenuhi persyaratan yang ada," ujar Wapres.

Terkait dengan PT Freeport Indonesia, Wapres menyatakan bahwa saat ini pemerintah sudah membentuk tim antardepartemen untuk meyakinkan pemerintah apakah syarat-syarat yang pernah diminta sudah dipenuhi oleh Freeport.

"Apakah itu pajaknya, apakah jumlah emas yang diekspor sudah sesuai, dan kandungan emasnya berapa, dan lainnya. Pokoknya, tim akan memastikan itu," kata Wapres.

Meskipun Wapres menilai kerja sama di Blok Cepu cukup baik, masih tetap dikecam oleh ber-

bagai kalangan dengan menyebut pengelolaan blok itu secara kolektif dengan ExxonMobil bertindak sebagai operator mendapat reaksi adanya potensi kerugian yang cukup besar dibandingkan jika diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina.

Cadangan minyak mentah di wilayah kerja Cepu mencapai 600 juta barrel, terdiri atas cadangan yang sudah disertifikasi maupun yang belum. Produksi minyak mentah Blok Cepu pada saat puncak diperkirakan 165.000 barrel per hari. Selain itu, ada tambahan dari produksi gas dengan cadangan mencapai 1,7 triliun kaki kubik.

Apabila beroperasi pada tahun 2008, Blok Cepu tak hanya menambah produksi minyak nasional, tetapi juga meningkatkan investasi dan memacu kegiatan ekonomi daerah. Jika sudah berproduksi, Cepu akan menghasilkan 3,3 miliar dollar AS per tahun. (HAR/DOT)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB <b>MAR</b> APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 <b>18</b> 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 18		TAHUN 2006

TAK SEORANG PEJABAT PUN YANG  
BISA MELIHATNYA

# Demi Emas, Freeport Pendam Pipa Rahasia

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Adrianto Maghribie diam-diam menemui Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR. Usai pertemuan, Adrianto keluar melalui lift yang tidak biasa dilewati para pejabat yang berkunjung ke DPR. Ada apa ia datang dengan cara seperti itu? Benarkah di kawasan Freeport terdapat daerah yang tak bisa dikunjungi pejabat Indonesia?

MENURUT Adrianto, pertemuan dengan Agung itu hanya sekadar silaturahmi. "Saya sudah lama tidak ketemu dengan Pak Agung. Jadi kebetulan siang ini beliau punya waktu ketemu dengan saya," kata Adrianto yang dalam pertemuan itu didampingi bekas Sesdalopbang zaman Orde Baru Humuntar Lumban Gaol. Mengenai kemungkinan keterlibatan partnership local (Badan Usaha Milik Daerah-BUMD) asal Papua, Adrianto menjawab, "Kan sudah kita tawarkan saham sebesar 9,3 persen. Sekarang terserah, kepada BUMD-nya," katanya.

Ditanya apakah angka 9,3 persen itu sudah cukup optimal, Adrianto diam saja. Lalu dia menjawab, "Ya, kalau mau persentase sahamnya lebih besar, silakan saja beli di bursa saham New York Stock Exchange. Itu bisa bebas belinya, asal duitnya ada." Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono membantah pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia hanya silaturahmi. Menurut Agung, dirinya sengaja memanggil petinggi perusahaan tersebut untuk klarifikasi beberapa hal penting, salah satunya soal keberadaan sebuah pipa yang

menjadi saluran untuk mengeruk sumber daya alam dari satu bukit di lokasi pertambangan, yang kemudian langsung disalurkan ke dalam kapal. "Menurut keterangan, saluran dan pipa itu mengeruk sumber daya alam seperti uranium, emas dan lainnya. Dan tidak ada satu pejabat pemerintah yang bisa menghitung berapa banyak yang dikeruk dan disalurkan melalui pipa itu. Bahkan pejabat pusat pun tidak bisa melihat secara langsung keberadaan pipa tersebut," kata Agung usai rapat pimpinan dan rapat konsultasi DPR, kemarin.

Dijelaskan, dalam pertemuan itu tidak membahas secara khusus renegotiasi kontrak karya PT Freeport karena kemungkinan soal itu tengah dibahas Panja (Panitia Kerja) Freeport DPR. "Tapi saya pikir, pemerintah dan PT Freeport harus membuka peluang ke arah renegotiasi tersebut, agar iklim investasi di Indonesia memang bisa memberikan keuntungan yang fair bagi masyarakat, khususnya Papua," ujarnya.

Menurut Agung, pihak PT Freeport Indonesia sampai sekarang masih menahan 9,3 persen saham Freeport yang sedianya diberikan kepada partnership local (BUMD), sampai ada kejelasan dari pemerintah setempat tentang kemampuan BUMD untuk membeli saham tersebut. "Saham 9,3 persen itu setara dengan nilai uang Rp 10 triliun. Sebab itu, pemerintah sebaiknya mencari jalan keluar agar ada BUMD Papua yang bisa membeli saham tersebut," katanya lagi.

Ia juga menyesalkan tentang terjadinya tindakan demonstrasi dari masyarakat setempat yang menyerbu Hotel Sheraton di Timika beberapa hari lalu. Menurutnya, tindakan yang mengarah ke anarkis hanya akan membuat posisi pemerintah Indonesia semakin terpojok di mata dunia internasional.

Menurutnya, pemerintah sejak dulu harus menyelesaikan persoalan yang muncul menyangkut Freeport dengan pendekatan ekonomi. Dengan demikian, katanya, setiap masalah bisa langsung di selesaikan tanpa berlarut-larut. "Jangan persoalan lingkungan seperti tailing dibawa-bawa ke wilayah politik. Persoalan Freeport itu kan menyangkut bisnis. Jadi harus diselesaikan dengan pendekatan ekonomi," katanya.

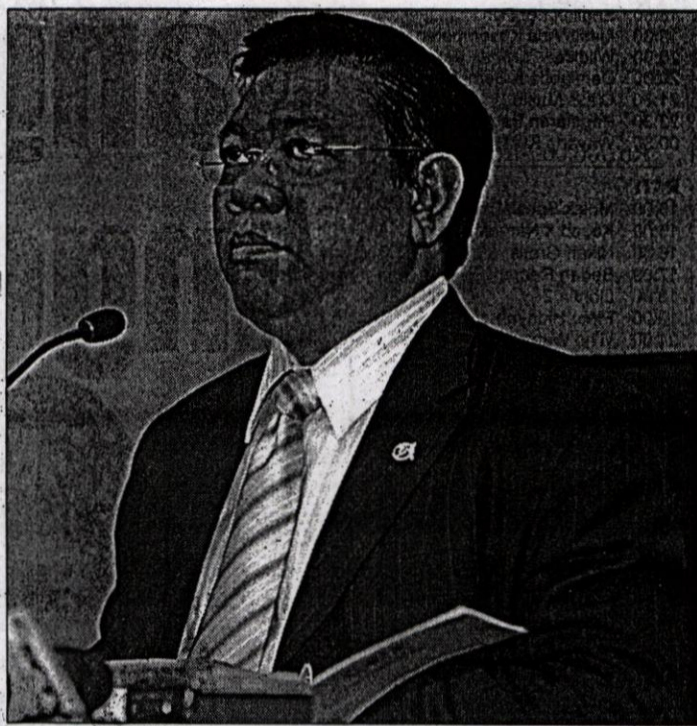
Agung menambahkan bahwa sebagai ketua DPR dirinya akan segera mengunjungi Freeport dalam waktu dekat ini. "Mungkin awal April, setelah reses. Sekalian membuktikan ada tidak wilayah di Freeport yang tidak bisa dikunjungi oleh pejabat Indonesia," tandasnya.

Sementara itu, Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah saatnya pemerintah melakukan renegotiasi ulang pengelolaan tambang yang sekarang dikelola PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. "Negosiasi yang sekarang ini sangat jelas tidak menguntungkan Indonesia, khususnya rakyat Papua. Tidak ada keterlibatan partnership local di Papua sebagai mitra Freeport. Ini kan namanya tidak adil," kata Tjahjo yang ditemui di Senayan.

Menurutnya, akar konflik yang muncul belakangan ini di Papua, merupakan akumulasi dari rasa ketidakadilan rakyat Papua atas kontrak karya dengan PT Freeport. "Jadi, renegotiasi merupakan pintu masuk bagi Papua untuk turut berpartisipasi secara adil dalam kontrak karya di Freeport," tukas Tjahjo.

Pendapat senada diungkapkan anggota Komisi VII DPR dari F-PG Gusti Iskandar bahwa renegotiasi terhadap kontrak karya Freeport perlu dilakukan. Apalagi, operasional Freeport di Papua, sudah berlangsung puluhan tahun. "Satu item saja, misalnya soap pemrosesan konsentrat emas yang 70 persen dilakukan Freeport di luar negeri. Seharusnya, sudah diubah. Kalah bisa 100 persen

dilakukan di dalam negeri. Sehingga kita bisa tahu, berapakah jumlah emas, tembaga atau mineral lain yang diproduksi Freeport. Nah, pemerintah dan Freeport harus berani terbuka dong," tukasnya.



Agung Laksono

Melihat keruhnya suasana di Papua akibat Freeport, Gusti berharap tidak berlarut-larut dan melebar. Saat ini, DPRD Papua dan MRP sedang melakukan rapat. Di harapkan segera menelorkan kepu-

tusan yang merepresentasikan kepentingan rakyat Papua. "Nah, pemerintah harus mendukung apapun keputusan kedua lembaga yang mewakili suara rakyat Papua itu," tandasnya. ■ IP/WIN